

PENCATATAN PERSEDIAAN BBM DI SPBU: EVALUASI AKURASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

RECORDING FUEL INVENTORY AT GAS STATION: EVALUATION OF ACCURACY AND ITS IMPLICATIONS FOR FINANCIAL REPORTS

Zhafira Sekar Putri¹, Amrie Firmansyah², Zef Arfiansyah³

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, ²Politeknik Keuangan Negara STAN;
[1zhafirasekar98@gmail.com](mailto:zhafirasekar98@gmail.com), [2amriefirmansyah@upnvj.ac.id](mailto:amriefirmansyah@upnvj.ac.id), [3zef.arfiansyah@pknstan.ac.id](mailto:zef.arfiansyah@pknstan.ac.id)

Abstrak: Persediaan merupakan salah satu aset utama yang berperan penting dalam mendukung aktivitas operasional perusahaan, termasuk dalam industri distribusi bahan bakar minyak (BBM). Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan persediaan adalah pencatatan yang tidak terperinci atau masih dilakukan secara manual, yang dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam laporan persediaan serta ketidaksesuaian dengan standar akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pencatatan persediaan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) X, yang beroperasi sebagai Dealer Owned Dealer Operated (DODO), dengan membandingkannya terhadap standar yang diatur dalam PSAK 202. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan mengolah data primer dan sekunder untuk dianalisis secara komparatif terhadap ketentuan PSAK 202. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan persediaan di SPBU X belum sepenuhnya sesuai dengan standar PSAK 202, terutama dalam perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP), yang berdampak pada akurasi laporan keuangan. Temuan ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam sistem pencatatan persediaan agar lebih akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Implementasi PSAK 202 diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan persediaan BBM, sehingga mampu memperkuat kepercayaan dan kepuasan pemangku kepentingan terhadap kinerja perusahaan.

Kata kunci: Persediaan, PSAK 202, Harga Pokok Penjualan, SPBU, laporan keuangan

Abstract: Inventory is one of the main assets that plays an important role in supporting the company's operational activities, including in the fuel distribution industry. One problem that often arises in inventory management is recording that is not detailed or is still done manually, which can cause inaccuracy in inventory reports and non-compliance with accounting standards. This study aims to evaluate the fuel inventory recording system at the General Fuel Filling Station (SPBU) X, which operates as a Dealer Owned Dealer Operated (DODO), by comparing it to the standards in PSAK 202. The research approach used is quantitative descriptive, by processing primary and secondary data to be analyzed comparatively against the provisions of PSAK 202. The study results indicate that inventory recording at SPBU X is not fully under the PSAK 202 standard, especially in calculating the Cost of Goods Sold (HPP), which impacts the accuracy of financial reports. This finding indicates the need to improve the inventory recording system to be more accurate and follow applicable accounting standards. Implementing PSAK 202 is expected to improve fuel inventory reports' quality, strengthening stakeholder trust and satisfaction with the company's performance.

Keywords: Inventory, PSAK 202, Cost of Goods Sold, Gas Station, Financial Report

PENDAHULUAN

Persaingan dalam dunia usaha semakin ketat seiring dengan munculnya perusahaan-perusahaan baru yang menghadirkan berbagai inovasi, baik dalam bidang jasa, perdagangan, maupun manufaktur. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk mengelola sumber daya dan asetnya secara optimal guna meningkatkan efisiensi operasional serta memperoleh keuntungan maksimal. Salah

satu aset utama dalam perusahaan dagang dan manufaktur adalah persediaan, yang menjadi bagian signifikan dari modal kerja dan berperan penting dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Persediaan didefinisikan sebagai aset lancar yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan usaha atau digunakan sebagai bahan dalam produksi barang jadi (Kieso et al., 2024). Sistem pencatatan persediaan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi

memegang peranan penting dalam memastikan transparansi dan efisiensi operasional perusahaan (Kieso et al., 2024).

Metode pencatatan persediaan berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan, terutama dalam perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP). Dalam perusahaan dagang, persediaan umumnya terdiri dari satu jenis, yaitu persediaan barang dagangan. Sebaliknya, perusahaan manufaktur mengelola tiga kategori persediaan, yakni bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Sistem pencatatan persediaan terbagi menjadi dua, yaitu sistem persediaan perpetual dan sistem persediaan periodik. Sistem persediaan perpetual mencatat setiap perubahan persediaan secara real-time, sedangkan sistem persediaan periodik menghitung jumlah persediaan pada akhir periode akuntansi. Pemilihan metode pencatatan yang tepat berdampak pada akurasi laporan keuangan dan efektivitas pengelolaan persediaan (Kieso et al., 2024).

Penelitian ini berfokus pada evaluasi sistem pencatatan persediaan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) X, yang beroperasi dalam kategori Dealer Owned Dealer Operated (DODO). SPBU ini dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh pihak swasta, namun tetap berada di bawah regulasi PT Pertamina. Sebagai perusahaan dagang, SPBU X berperan dalam mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat dengan memastikan stok BBM di tangki penyimpanan selalu mencukupi. Pencatatan transaksi penjualan dilakukan menggunakan sistem komputerisasi dengan mesin fuel dispenser yang menghitung jumlah liter dan total harga BBM yang dijual. Namun, pencatatan transaksi pembelian BBM masih dilakukan secara manual dengan Microsoft Word dan Excel, tanpa integrasi dengan sistem PT Pertamina. Ketidakterpaduan ini menyebabkan berbagai kendala, terutama dalam verifikasi data dan penyusunan laporan persediaan.

Observasi awal menunjukkan bahwa pencatatan persediaan di SPBU X belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, khususnya PSAK 202. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan dalam perhitungan HPP dan menghambat transparansi laporan keuangan. Karakteristik BBM sebagai barang yang mudah menguap menambah tantangan dalam pencatatan persediaan, yang memerlukan metode pencatatan khusus guna mengurangi risiko kehilangan stok akibat penguapan selama proses distribusi dan penyimpanan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas aspek pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan persediaan dalam berbagai industri. Kartinah & Kuncara (2021) meneliti penerapan metode pencatatan persediaan di toko pakaian dan menemukan bahwa pencatatan dilakukan tanpa metode yang sesuai dengan PSAK 14 (saat ini PSAK 202), seperti FIFO atau rata-rata, sehingga menyebabkan ketidakakuratan dalam pengelolaan persediaan. Perbedaan karakteristik barang antara industri pakaian dan bahan bakar minyak (BBM) menuntut penelitian lebih lanjut mengenai metode pencatatan yang lebih relevan bagi SPBU, khususnya dalam menghadapi tantangan volatilitas persediaan akibat penguapan BBM.

Firmansyah et al. (2020) mengulas pengungkapan kebijakan persediaan pada perusahaan perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dagang memiliki tingkat kepatuhan yang bervariasi dalam mengungkapkan kebijakan persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa perusahaan hanya menyajikan informasi terbatas mengenai metode pencatatan persediaan mereka, tanpa memberikan detail mengenai dampaknya terhadap harga pokok penjualan (HPP).

Relevansi penelitian ini terhadap SPBU X adalah bahwa pengungkapan kebijakan persediaan menjadi aspek penting dalam transparansi laporan keuangan, terutama bagi pemangku kepentingan yang bergantung pada akurasi data persediaan untuk pengambilan keputusan.

Sementara itu, Jumig & Firmansyah (2018) membahas kebijakan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan persediaan dalam laporan keuangan perusahaan tekstil dan garmen. Penelitian ini menyoroti bagaimana standar akuntansi memberikan fleksibilitas dalam pemilihan metode pencatatan, yang pada akhirnya memberikan diskresi kepada manajemen dalam menentukan metode yang digunakan. Fleksibilitas ini berpotensi menciptakan asimetri informasi antara agen dan prinsipal, terutama ketika metode yang dipilih tidak sepenuhnya transparan atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam konteks SPBU X, ketidaksesuaian pencatatan persediaan dengan PSAK 14 (sekarang PSAK 202) dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan HPP, yang berimbas pada akurasi laporan keuangan. Penelitian ini menjadi relevan karena menunjukkan bagaimana penerapan metode pencatatan yang berbeda dapat berdampak pada penyajian laporan keuangan, serta perlunya standarisasi dalam pengelolaan persediaan untuk meningkatkan keandalan informasi akuntansi.

Selain itu, penelitian Elvionita & Hastuti (2024) menunjukkan bahwa penggunaan sistem pencatatan manual dalam pengelolaan persediaan memiliki beberapa kelemahan, termasuk potensi kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporan, serta kehilangan data. Studi ini menyoroti bahwa otomatisasi dan integrasi sistem informasi persediaan sangat penting untuk meningkatkan akurasi data dan memperbaiki kualitas laporan keuangan. Dalam kasus SPBU X, penggunaan Microsoft Word dan Excel untuk mencatat transaksi pembelian dan penjualan BBM

menunjukkan ketergantungan pada pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan, sehingga berisiko menghasilkan laporan persediaan yang tidak akurat.

Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan dalam pencatatan dan pengungkapan persediaan bukan hanya terbatas pada pemilihan metode pencatatan yang sesuai, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku dan efektivitas sistem pencatatan yang digunakan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kesenjangan literatur dengan mengevaluasi sistem pencatatan persediaan di SPBU X dan membandingkannya dengan standar PSAK 202. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi penerapan metode pencatatan yang lebih sesuai guna meningkatkan akurasi, transparansi, dan keandalan informasi persediaan bagi pemangku kepentingan.

LANDASAN TEORI (JIKA DIPERLUKAN)

Teori Pemangku Kepentingan dalam Konteks SPBU X

Freeman (1984) menjadi salah satu pelopor dalam memperkenalkan teori pemangku kepentingan secara sistematis. Ia tidak hanya menjelaskan hubungan antara perusahaan dan lingkungan eksternal, tetapi juga bagaimana perilaku perusahaan berinteraksi dengan lingkungannya, yang menjadi dasar bagi pengembangan teori ini. Clarkson (1995) menambahkan bahwa perusahaan terdiri dari berbagai pemangku kepentingan dan beroperasi dalam suatu masyarakat yang menyediakan infrastruktur hukum serta mekanisme pasar yang mendukung aktivitasnya.

Teori pemangku kepentingan berfokus pada bagaimana perusahaan dikendalikan melalui jaringan hubungan formal maupun informal yang melibatkan berbagai

pemangku kepentingan (Freeman, 1984). Berbagai hubungan ini turut memengaruhi cara risiko dan pengembalian dialokasikan di antara para pemangku kepentingan. Freeman (1984) mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai individu atau entitas yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Pemangku kepentingan diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu pemangku kepentingan primer dan pemangku kepentingan sekunder. Pemangku kepentingan primer mencakup pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam aktivitas perusahaan, seperti pemegang saham, kreditor, pelanggan, pemasok, manajer, karyawan, serta masyarakat lokal dan pemerintah daerah (Freeman, 1984). Sementara itu, pemangku kepentingan sekunder mencakup kelompok yang tidak secara langsung terdampak oleh keberhasilan atau kegagalan perusahaan, namun tetap memiliki kepentingan terhadap aktivitasnya, seperti regulator, pesaing, media, dan lembaga sipil (Donaldson & Preston, 1995).

Dalam konteks SPBU X, pemangku kepentingan terdiri dari pemilik perusahaan, PT Pertamina sebagai auditor internal, petugas pajak dalam hal ini Account Representative Kantor Pelayanan Pajak, serta masyarakat sebagai konsumen, terutama karena persediaan mencakup BBM subsidi seperti pertalite. Pemangku kepentingan yang memiliki kewajiban untuk mengevaluasi kegiatan operasional bisnis memastikan bahwa persediaan BBM, yang merupakan inti dari usaha SPBU, selalu tersedia dalam jumlah yang memadai. Oleh karena itu, manajemen memiliki tanggung jawab untuk menyajikan data yang akurat dalam laporan keuangan, termasuk informasi terkait persediaan BBM, sehingga transparansi dalam operasional bisnis dapat terjaga. Akuntabilitas terhadap data persediaan ini juga sejalan dengan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang menekankan transparansi informasi

kepada pemangku kepentingan (Clarkson, 1995).

Donaldson & Preston (1995) mengklasifikasikan teori pemangku kepentingan ke dalam tiga kategori utama. Teori deskriptif menjelaskan karakteristik dan perilaku perusahaan berdasarkan interaksinya dengan pemangku kepentingan. Teori instrumental menghubungkan pengelolaan pemangku kepentingan dengan pencapaian tujuan perusahaan, seperti peningkatan efisiensi dan profitabilitas. Sementara itu, teori normatif menekankan pentingnya prinsip moral dan etika dalam hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan.

Dalam teori instrumental, pemangku kepentingan dipandang memiliki nilai strategis karena kontribusinya terhadap kinerja dan daya saing perusahaan (Jones, 1995). Sebaliknya, teori normatif berpendapat bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral terhadap pemangku kepentingannya, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai keuntungan. Pendekatan normatif ini mengharuskan perusahaan untuk menjalankan praktik bisnis yang adil dan etis, serta tidak mengeksploitasi pemangku kepentingan hanya demi kepentingan ekonomi. Dalam konteks SPBU X, pendekatan ini mencerminkan pentingnya transparansi dalam pencatatan dan pelaporan persediaan BBM, mengingat BBM subsidi seperti pertalite merupakan bagian dari kepentingan publik.

Dari perspektif praktis, Jones (1995) menekankan bahwa komitmen perusahaan terhadap prinsip etika tidak hanya menciptakan manfaat sosial, tetapi juga berkontribusi pada keuntungan jangka panjang. Kepercayaan dan kerja sama yang kuat dengan pemangku kepentingan dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Clarkson (1995) juga menambahkan bahwa penerapan teori pemangku kepentingan dalam pengelolaan hubungan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas dalam menganalisis konsep

seperti tanggung jawab sosial perusahaan, daya tanggap sosial perusahaan, serta kinerja sosial perusahaan. Dalam operasional SPBU X, pendekatan ini menjadi sangat relevan, terutama karena pengelolaan persediaan BBM tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga pada kepentingan masyarakat sebagai konsumen utama. Transparansi dalam pelaporan persediaan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Keakuratan data yang disediakan oleh manajemen menjadi faktor kunci dalam menciptakan sistem bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memenuhi tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap standar akuntansi serta regulasi pemerintah. Dalam hal ini, teori pemangku kepentingan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana hubungan perusahaan dengan berbagai pihak terkait dapat dikelola secara lebih efektif, baik untuk kepentingan ekonomi maupun sosial.

Konsep Persediaan

Persediaan merupakan salah satu aset utama dalam operasional perusahaan dagang maupun manufaktur, karena menjadi bagian penting dalam proses bisnis yang berkelanjutan. Kieso et al. (2024) mendefinisikan persediaan sebagai aset perusahaan yang diperuntukkan untuk dijual dalam kegiatan operasional atau digunakan dalam proses produksi hingga menghasilkan barang jadi. Brigham & Houston (2019) menjelaskan bahwa persediaan mencakup pembelian barang atau bahan dengan tujuan untuk dijual kembali, digunakan sebagai bahan pembantu, atau sebagai bahan baku dalam produksi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 202 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyebutkan bahwa persediaan diklasifikasikan sebagai aset lancar yang

memenuhi tiga kriteria, yaitu tersedia untuk dijual dalam operasi bisnis yang normal, berada dalam proses produksi untuk dijual, atau berupa bahan atau peralatan yang digunakan dalam produksi atau penyediaan layanan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023).

Dalam industri distribusi bahan bakar minyak (BBM), persediaan terdiri dari berbagai jenis bahan bakar dengan karakteristik yang berbeda. Peralite merupakan bahan bakar gasoline dengan angka oktan 90 yang digunakan sebagai alternatif bagi konsumen yang sebelumnya menggunakan Premium (RON 88). Peralite dikenal sebagai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan karena memiliki sistem pembakaran yang lebih sempurna dan efisien. Pertamina memiliki angka oktan minimal 92 dengan tingkat pembakaran yang lebih bersih dibandingkan bahan bakar Premium, sehingga dapat meningkatkan efisiensi mesin kendaraan. Pertamina Turbo memiliki angka oktan lebih tinggi, yaitu minimal 98, yang memberikan kinerja lebih optimal bagi kendaraan berperforma tinggi. Sementara itu, Dexlite merupakan varian bahan bakar diesel yang dikembangkan untuk kendaraan berteknologi common rail, dengan cetane number tertinggi 53 dan kandungan sulfur lebih rendah dibandingkan Pertamina Dex, sehingga lebih ramah lingkungan.

Pengukuran dan Pencatatan Persediaan

Menurut PSAK 202, pengukuran persediaan didasarkan pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023). Biaya persediaan mencakup biaya pembelian yang meliputi harga pokok pembelian, bea masuk, biaya transportasi, dan biaya penanganan, yang dikurangi dengan diskon atau potongan pembelian. Selain itu, biaya konversi mencakup biaya produksi langsung seperti tenaga kerja langsung dan alokasi biaya overhead manufaktur, baik tetap maupun variabel. Overhead tetap meliputi biaya

penyusutan, pemeliharaan peralatan, dan biaya operasional gedung, sementara overhead variabel mencakup biaya bahan baku tidak langsung yang berubah sesuai dengan tingkat produksi.

Kieso et al. (2024) menyatakan bahwa perusahaan menggunakan salah satu dari dua sistem pencatatan persediaan, yaitu sistem persediaan perpetual atau sistem persediaan periodik. Sistem persediaan perpetual mencatat setiap transaksi pembelian dan penjualan secara langsung dalam akun persediaan, sehingga saldo persediaan selalu diperbarui. Dalam sistem ini, pembelian barang dagangan dicatat sebagai debit dalam akun persediaan, sementara pengeluaran barang dagangan akibat penjualan dicatat dalam akun Harga Pokok Penjualan (HPP). Setiap transaksi penjualan juga memerlukan pencatatan kuantitas dan biaya barang yang terjual, yang memudahkan perusahaan dalam melakukan pelacakan persediaan. Jika terjadi ketidaksesuaian antara catatan akuntansi dan hasil pemeriksaan fisik, perusahaan perlu melakukan penyesuaian pada laporan keuangan.

Sistem persediaan periodik memiliki pendekatan yang berbeda, di mana perusahaan hanya melakukan pencatatan transaksi pembelian ke dalam akun pembelian, sementara jumlah persediaan akhir ditentukan melalui perhitungan fisik di akhir periode akuntansi. Dalam sistem ini, HPP dihitung berdasarkan jumlah persediaan awal yang ditambahkan dengan pembelian selama periode berjalan, kemudian dikurangi dengan jumlah persediaan akhir berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Perbedaan utama dengan sistem perpetual adalah sistem periodik tidak memperbarui saldo persediaan secara real-time dan hanya menghitung persediaan secara berkala.

Menurut Arens & Loebbecke (2017), tujuan utama dari sistem informasi akuntansi adalah untuk mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan perusahaan guna menjaga

akuntabilitas terhadap aset yang dimiliki. Romney & Steinbart (2018) menambahkan bahwa sistem informasi dan komunikasi dalam akuntansi harus mampu mengolah transaksi secara sistematis, mulai dari inisiasi, pengumpulan data dalam format yang dapat diproses, hingga pelaporan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Keberhasilan sistem informasi akuntansi sangat bergantung pada keakuratan data persediaan yang dicatat dan dilaporkan oleh perusahaan.

Aktivitas Pengendalian dalam Manajemen Persediaan

Manajemen persediaan yang efektif membutuhkan aktivitas pengendalian yang dapat memastikan tujuan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Romney & Steinbart (2018) menjelaskan bahwa aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengurangi risiko operasional dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Arens & Loebbecke (2017) mengidentifikasi berbagai mekanisme pengendalian dalam pencatatan dan pengelolaan persediaan, termasuk pemisahan tugas dalam pencatatan dan penyimpanan, otorisasi transaksi yang ketat, pengelolaan dokumen yang akurat, pengendalian fisik terhadap aset, serta pemeriksaan berkala atas kinerja operasional dan keakuratan laporan keuangan.

Dalam konteks industri distribusi BBM, pengelolaan persediaan menjadi aspek kritis yang tidak hanya berdampak pada laporan keuangan, tetapi juga terhadap kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, terutama dalam distribusi BBM bersubsidi. Oleh karena itu, penerapan sistem pencatatan yang akurat serta mekanisme pengendalian yang memadai akan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan persediaan BBM.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten untuk mengevaluasi sistem pencatatan persediaan di SPBU X serta membandingkannya dengan standar PSAK 202. Analisis konten digunakan sebagai metode utama dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi pola dalam pencatatan persediaan yang diterapkan oleh SPBU X, menelusuri kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku, serta menemukan potensi ketidaksesuaian yang dapat memengaruhi akurasi laporan keuangan. Objek penelitian adalah SPBU X, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi bahan bakar minyak (BBM) dengan model bisnis Dealer Owned Dealer Operated (DODO). SPBU ini dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh pihak swasta serta berlokasi di Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat 40614. Penelitian ini berfokus pada bagaimana sistem pencatatan persediaan diterapkan dalam operasional harian dan bagaimana pencatatan tersebut mencerminkan praktik yang sesuai dengan standar PSAK 202.

Analisis konten dimulai dengan pengumpulan dan pengkajian dokumen pencatatan persediaan, termasuk laporan keuangan, Delivery Order (DO) dari aplikasi MyPertamina, data persediaan BBM, serta dokumen lain yang digunakan dalam operasional pencatatan persediaan di SPBU X. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengidentifikasi metode pencatatan yang digunakan, apakah menggunakan sistem persediaan perpetual atau periodik, serta bagaimana kebijakan pengakuan, pengukuran, dan penyajian persediaan diterapkan dalam laporan keuangan. Pengkodean dilakukan sebagai bagian dari analisis konten untuk mengklasifikasikan informasi ke dalam kategori tertentu, seperti metode pencatatan yang diterapkan, kebijakan pengukuran nilai persediaan, serta bagaimana data persediaan disajikan dalam laporan keuangan. Proses ini memungkinkan penelitian untuk

mengungkap pola dalam pencatatan yang mungkin menunjukkan ketidaksesuaian dengan PSAK 202 atau hambatan dalam implementasi standar akuntansi.

Setelah hasil analisis konten diperoleh, wawancara dan observasi langsung dilakukan untuk menguatkan temuan yang didapat dari analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan pegawai yang bertanggung jawab atas pencatatan persediaan untuk mengonfirmasi informasi yang telah dianalisis sebelumnya serta menggali lebih dalam mengenai kendala yang dihadapi dalam pencatatan persediaan. Wawancara juga digunakan untuk memahami sejauh mana pemahaman pegawai terhadap standar PSAK 202 dalam pencatatan persediaan BBM serta bagaimana mereka mengelola transaksi harian yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan BBM.

Observasi langsung dilakukan dengan mengamati praktik pencatatan persediaan di SPBU X, termasuk bagaimana transaksi pembelian dan penjualan BBM dicatat, bagaimana sistem pencatatan dioperasikan, serta bagaimana perusahaan memastikan keakuratan data persediaan. Observasi ini membantu dalam menilai apakah pencatatan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan atau terdapat perbedaan antara data yang tercatat dengan praktik aktual di lapangan. Hasil dari wawancara dan observasi digunakan untuk mengelaborasi dan memperkuat temuan yang telah diperoleh dari analisis konten. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengandalkan data tekstual dari dokumen pencatatan tetapi juga memperhitungkan pengalaman langsung dari pegawai yang bertanggung jawab serta kondisi operasional di SPBU X.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sistem pencatatan persediaan di SPBU X menggunakan metode periodik, di mana stok BBM hanya diperbarui berdasarkan pemeriksaan fisik di akhir periode. Penggunaan metode ini masih mengandalkan pencatatan manual yang dilakukan oleh operator, baik dalam kartu inventaris maupun dalam laporan keuangan SPBU X. Penggunaan *Automatic Tank Gauge* (ATG) sebagai alat pemantauan stok BBM membantu dalam mencatat jumlah stok secara real-time, tetapi pencatatan stok akhir dalam laporan keuangan masih dilakukan secara manual, yang menyebabkan adanya perbedaan dalam jumlah persediaan yang dicatat dan yang sebenarnya tersedia di tangki penyimpanan.

Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) SPBU X menunjukkan bahwa terdapat potensi ketidaktepatan dalam pencatatan stok BBM yang dapat memengaruhi laporan keuangan. Berdasarkan data yang diperoleh, HPP dihitung berdasarkan formula persediaan awal ditambah dengan pembelian BBM selama periode berjalan, lalu dikurangi dengan persediaan akhir yang tersisa di tangki penyimpanan.

Tabel berikut menunjukkan perhitungan HPP berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh SPBU X:

Tabel 1 Perhitungan HPP SPBU X Bulan X Tahun 202X

Keterangan	Jumlah (Rp)
Persediaan Awal	365.670.613
Pembelian	2.857.850.768
Total Stock	3.223.521.381
Persediaan Akhir	(316.144.567)
HPP	2.907.376.814

Sumber: Laporan Keuangan SPBU X Bulan X Tahun 202X

Perhitungan HPP ini kemudian dibandingkan dengan HPP yang dihitung berdasarkan harga beli per liter dari PT

Pertamina. Hasil perbandingan menunjukkan adanya perbedaan antara pencatatan manual dengan nilai yang dihitung berdasarkan kuantitas penjualan dan harga beli.

Tabel 2 Perhitungan HPP Berdasarkan Harga Beli

Jenis BBM	Harga Beli per Liter (Rp)	Kuantitas Terjual (liter)	HPP (Rp)
Pertamax Turbo	13.906	2.785	38.726.776
Pertamax	12.533	51.765	648.765.058
Pertalite	9.702	225.263	2.185.401.816
Pertamina Dex	14.638	1.857	27.180.453
Dexlite	14.096	14	197.349
HPP Berdasarkan Harga Beli			2.900.271.452
HPP Berdasarkan Pencatatan			2.907.376.814

Sumber: Data diolah berdasarkan transaksi

Perbedaan sebesar Rp7.105.363 menunjukkan adanya potensi selisih dalam pencatatan stok BBM, yang dapat berasal dari beberapa faktor seperti penguapan BBM, kesalahan dalam pencatatan manual, atau kemungkinan adanya kecurangan dalam operasional SPBU. Penguapan merupakan faktor yang tidak bisa dihindari sepenuhnya, tetapi tetap harus diperhitungkan dalam sistem pencatatan yang lebih akurat agar tidak terjadi distorsi dalam laporan keuangan.

Analisis lebih lanjut dilakukan untuk mengetahui jenis BBM yang mengalami perbedaan dalam pencatatan stok. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sebagian besar perbedaan berasal dari jenis Pertamax dan Pertalite, yang memiliki

volume transaksi lebih besar dibandingkan jenis BBM lainnya.

Tabel 3 Perhitungan Selisih HPP

Jenis BBM	Harga Beli per Liter (Rp)	Selisih Stok Akhir (liter)	Selisih HPP (Rp)
Pertamax Turbo	13.906	75	1.046.846
Pertamax	12.533	370	4.640.134
Pertalite	9.702	82	791.453
Pertamina Dex	14.638	33	485.966
Dexlite	14.096	10	140.964

Sumber: Data diolah berdasarkan data kartu inventaris

Perbedaan dalam pencatatan stok ini dapat berdampak pada penyajian laporan keuangan SPBU X, terutama dalam menentukan laba kotor perusahaan. Jika selisih ini tidak dicatat dengan benar, maka nilai HPP yang digunakan dalam laporan keuangan menjadi tidak akurat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan perhitungan laba yang lebih besar atau lebih kecil dari nilai sebenarnya. Untuk mengatasi perbedaan tersebut, salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah mencatat selisih akibat penguapan sebagai beban penyusutan dalam laporan laba rugi. Dengan mencatat penguapan sebagai beban penyusutan, laporan keuangan akan lebih mencerminkan realitas operasional SPBU.

Ketidaksesuaian dalam pencatatan stok BBM memiliki dampak langsung terhadap laporan laba rugi SPBU X. Jika perbedaan akibat penguapan tidak dicatat sebagai penyusutan, maka laba yang dilaporkan akan lebih rendah dibandingkan dengan yang seharusnya. Jika selisih ini tidak diakui sebagai beban penyusutan, maka ada kemungkinan nilai laba yang lebih rendah dari yang seharusnya dilaporkan, yang dapat berpengaruh terhadap analisis kinerja keuangan SPBU X dan evaluasi oleh pemilik usaha maupun auditor. Sistem pencatatan manual yang diterapkan oleh

SPBU X juga membuka peluang terjadinya fraud atau kecurangan dalam operasional SPBU, baik yang dilakukan oleh petugas lapangan maupun dalam sistem pencatatan itu sendiri. Tanpa sistem pencatatan yang lebih transparan dan akurat, risiko ini dapat semakin tinggi.

Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa metode pencatatan persediaan yang diterapkan SPBU X belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi PSAK 202, terutama dalam hal pengakuan persediaan akhir dan perhitungan HPP. Perbedaan dalam pencatatan stok BBM perlu diatasi dengan sistem yang lebih akurat, termasuk penggunaan teknologi pencatatan berbasis sistem otomatis serta audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa data persediaan yang dilaporkan benar-benar mencerminkan kondisi aktual di lapangan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan persediaan di SPBU X masih menggunakan sistem periodik yang dilakukan secara manual. Pencatatan ini dilakukan berdasarkan jumlah bahan bakar minyak yang diterima dari PT Pertamina dan stok akhir yang diperiksa menggunakan *Automatic Tank Gauge* (ATG). Namun, pencatatan secara manual menimbulkan beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap akurasi laporan keuangan. Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang dilakukan berdasarkan pencatatan manual menunjukkan perbedaan dengan perhitungan HPP berdasarkan harga beli yang seharusnya. Selisih dalam pencatatan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang dapat memengaruhi keandalan laporan keuangan.

Ketidaksesuaian sistem pencatatan persediaan dengan PSAK 202 menjadi salah satu temuan utama dalam penelitian ini. PSAK 202 mengatur bahwa persediaan harus diukur menggunakan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana

yang lebih rendah. Dalam praktiknya, pencatatan yang dilakukan oleh SPBU X masih mengandalkan perhitungan manual yang tidak sepenuhnya memperhitungkan faktor kehilangan stok akibat penguapan atau kemungkinan kesalahan pencatatan. Selisih sebesar Rp7.105.363 yang ditemukan dalam perhitungan HPP menjadi indikasi adanya perbedaan pencatatan yang dapat berpengaruh terhadap laporan laba rugi. Jika perbedaan ini tidak diakui dalam laporan keuangan, maka laba yang disajikan dalam laporan keuangan dapat mengalami overstatement atau understatement.

Dampak dari pencatatan manual terhadap laporan keuangan menjadi aspek penting dalam pembahasan ini. Laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen SPBU X. Jika persediaan akhir yang dicatat lebih tinggi dari yang sebenarnya, maka HPP yang dihitung akan lebih kecil, sehingga laba yang dilaporkan akan lebih tinggi dari kondisi riil. Sebaliknya, jika stok akhir yang dicatat lebih rendah dari yang seharusnya, maka HPP akan lebih tinggi dan laba yang dicatat lebih rendah. Dalam praktik bisnis, kesalahan ini dapat berdampak pada penentuan strategi operasional dan evaluasi kinerja keuangan SPBU.

Faktor utama yang menyebabkan perbedaan dalam pencatatan persediaan di SPBU X adalah penguapan BBM selama transportasi dan penyimpanan. BBM memiliki sifat volatil yang menyebabkan penguapan, terutama ketika dipindahkan dari depo PT Pertamina ke tangki penyimpanan SPBU. Penguapan ini semakin signifikan dalam kondisi suhu tinggi atau jika ada perbedaan tekanan di dalam tangki. Cantelmi et al. (2022) menyatakan bahwa rata-rata 2-3% dari total volume bahan bakar dapat hilang akibat penguapan, terutama dalam kondisi lingkungan yang panas dan kurangnya sistem pengamanan pada tangki

penyimpanan. Dalam konteks SPBU X, penguapan ini dapat menjadi penyebab utama selisih antara jumlah BBM yang diterima dan jumlah yang tercatat dalam laporan stok.

Selain penguapan, kesalahan pencatatan manual juga menjadi penyebab ketidaksesuaian dalam pencatatan stok BBM. Pencatatan yang dilakukan oleh operator berdasarkan laporan harian dapat mengalami ketidaksesuaian akibat faktor human error. Kesalahan dalam mencatat jumlah BBM yang masuk dan keluar dapat menyebabkan selisih dalam perhitungan persediaan akhir. Romney & Steinbart (2018) menekankan bahwa pencatatan manual lebih rentan terhadap kesalahan dibandingkan dengan sistem digital, karena tidak memiliki mekanisme otomatis untuk mendeteksi anomali dalam laporan stok. Kesalahan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti salah memasukkan angka dalam pencatatan, kelalaian dalam memperbarui kartu inventaris, atau tidak melakukan pemeriksaan stok secara menyeluruh.

Selain faktor teknis, potensi fraud dalam operasional SPBU juga menjadi salah satu penyebab selisih dalam pencatatan persediaan. Bisnis yang masih menggunakan pencatatan manual lebih rentan terhadap manipulasi data dibandingkan dengan bisnis yang sudah menerapkan sistem pencatatan otomatis (Arens & Loebbecke, 2017). Dalam konteks SPBU X, kemungkinan fraud dapat terjadi ketika operator atau petugas lapangan dengan sengaja mengurangi kuantitas BBM yang dilaporkan agar selisih tersebut dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Potensi fraud ini semakin besar ketika sistem pengawasan internal di SPBU tidak cukup ketat dalam memantau pencatatan dan verifikasi stok BBM.

Selisih dalam pencatatan stok juga dapat dipengaruhi oleh penggunaan *Automatic Tank Gauge* (ATG) yang tidak selalu memberikan pembacaan yang

akurat. ATG dirancang untuk memantau stok BBM di dalam tangki secara real-time, tetapi dalam beberapa kasus, sistem ini tidak dapat membaca kehilangan stok yang terjadi secara bertahap akibat penguapan. Hal ini menyebabkan jumlah BBM yang tercatat dalam ATG berbeda dengan jumlah BBM yang tersisa di tangki ketika dilakukan pemeriksaan fisik. Ketidaktepatan dalam pembacaan ATG ini dapat semakin meningkatkan perbedaan dalam pencatatan stok BBM yang dilakukan secara manual oleh operator.

Dampak dari perbedaan pencatatan stok BBM juga berpengaruh terhadap kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Dalam teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*), perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan yang transparan bagi semua pihak yang berkepentingan (Freeman, 1984). Dalam konteks SPBU X, pemangku kepentingan utama yang terpengaruh oleh perbedaan pencatatan persediaan ini meliputi pemilik SPBU, PT Pertamina sebagai pemasok utama BBM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), yang bertanggung jawab dalam pengawasan distribusi BBM dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta konsumen yang bergantung pada ketersediaan BBM. Ketidakakuratan dalam laporan keuangan dapat menimbulkan konsekuensi seperti meningkatnya pengawasan dari PT Pertamina, pemeriksaan pajak yang lebih ketat, serta kemungkinan sanksi administratif jika ditemukan ketidaksesuaian yang signifikan dalam laporan keuangan.

Implikasi terhadap evaluasi kinerja keuangan juga menjadi perhatian dalam pembahasan ini. Jika selisih dalam pencatatan stok BBM tidak dicatat sebagai beban penyusutan, maka laporan laba rugi tidak akan mencerminkan kondisi operasional yang sebenarnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, pencatatan selisih

stok BBM sebagai beban penyusutan akan membuat laporan keuangan lebih akurat dalam menggambarkan kondisi keuangan SPBU X. Dalam PSAK 202 yang mengatur akuntansi persediaan, dinyatakan bahwa setiap kehilangan persediaan yang dapat diidentifikasi harus diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023). Jika SPBU X tidak mengakui selisih akibat penguapan sebagai beban, maka HPP yang dicatat akan lebih besar dari nilai yang seharusnya, yang berakibat pada laba yang lebih rendah. Sebaliknya, jika selisih ini dicatat secara benar, maka laporan laba rugi akan lebih mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Pencatatan manual yang masih digunakan di SPBU X juga memiliki konsekuensi jangka panjang dalam aspek audit dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam sistem pencatatan yang belum terdigitalisasi, dokumen-dokumen seperti kartu inventaris dan laporan harian dapat lebih sulit ditelusuri dalam proses audit. Jika terjadi ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan kondisi sebenarnya, auditor dapat meminta bukti tambahan yang memperlambat proses pemeriksaan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penyajian laporan keuangan. Bisnis yang masih menggunakan sistem manual memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi terhadap kesalahan pencatatan dan membutuhkan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi (Kieso et al., 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pencatatan yang diterapkan di SPBU X belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 202 dalam hal pengakuan persediaan akhir dan perhitungan HPP. Ketidaksesuaian ini dapat berdampak pada akurasi laporan keuangan dan meningkatkan risiko audit oleh regulator. Ketepatan dalam pencatatan stok BBM menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga transparansi laporan keuangan,

serta memastikan bahwa operasional bisnis berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pencatatan persediaan di SPBU X masih menggunakan metode periodik yang dilakukan secara manual. Pencatatan ini menyebabkan ketidaktepatan dalam perhitungan persediaan akhir dan Harga Pokok Penjualan (HPP), yang berdampak langsung pada laporan keuangan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan adanya selisih dalam pencatatan persediaan sebesar Rp7.105.363, yang disebabkan oleh faktor penguapan BBM, kesalahan pencatatan manual, serta potensi fraud dalam operasional SPBU. Ketidaktepatan dalam pencatatan stok berimplikasi terhadap akurasi laporan keuangan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi evaluasi kinerja keuangan SPBU X oleh manajemen dan pemangku kepentingan.

Penerapan sistem pencatatan manual yang belum sesuai dengan PSAK 202 juga berisiko menyebabkan ketidaksesuaian dalam penyajian laporan keuangan. PSAK 202 mengatur bahwa persediaan harus diukur menggunakan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah, tetapi pencatatan di SPBU X belum mempertimbangkan aspek kehilangan stok akibat penguapan dan faktor lainnya. Selain itu, pengawasan terhadap sistem pencatatan masih terbatas, sehingga meningkatkan potensi fraud yang dapat terjadi dalam operasional SPBU.

Ketidaksesuaian sistem pencatatan persediaan ini tidak hanya berdampak pada laporan keuangan internal, tetapi juga berpengaruh terhadap kepentingan pemangku kepentingan seperti pemilik SPBU, PT Pertamina, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta konsumen. PT Pertamina sebagai pemasok utama BBM mengandalkan data stok SPBU untuk mengelola distribusi BBM secara efisien, sementara BPH Migas bertugas mengawasi mekanisme penyaluran BBM agar tidak terjadi penyimpangan dalam rantai distribusi. Kementerian ESDM memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa stok BBM nasional dikelola dengan baik untuk menjaga ketahanan energi nasional. Ketidakakuratan dalam pencatatan dapat menyebabkan laporan keuangan yang tidak dapat diandalkan dan berisiko menimbulkan ketidaksesuaian dalam sistem pengendalian persediaan BBM secara nasional.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada satu SPBU dengan jenis usaha Dealer Owned Dealer Operated (DODO), sehingga hasil penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasikan ke SPBU dengan skema pengelolaan yang berbeda, seperti Company Owned Dealer Operated (CODO). Kedua, metode penelitian yang digunakan masih berbasis analisis konten dari data sekunder dan wawancara dengan pihak internal SPBU, yang dapat memiliki keterbatasan dalam mengungkap faktor eksternal yang berpengaruh terhadap sistem pencatatan persediaan. Ketiga, penelitian ini belum mempertimbangkan aspek teknologi secara lebih mendalam, seperti penerapan sistem otomatisasi pencatatan persediaan dan integrasi dengan sistem PT Pertamina.

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian dengan cakupan yang lebih luas, seperti membandingkan sistem pencatatan persediaan di beberapa SPBU dengan model pengelolaan yang berbeda untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi penerapan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi

dalam pencatatan persediaan SPBU guna mengurangi kesalahan pencatatan manual. Kajian yang lebih mendalam mengenai peran regulasi dalam standarisasi sistem pencatatan persediaan BBM di Indonesia juga dapat menjadi topik penelitian yang relevan, terutama dalam konteks kepatuhan terhadap standar akuntansi dan kebijakan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa langkah perbaikan dapat diterapkan oleh SPBU X untuk meningkatkan akurasi pencatatan persediaan dan kualitas laporan keuangan. Pertama, mengadopsi sistem pencatatan perpetual yang memungkinkan pencatatan stok BBM secara real-time sehingga mengurangi perbedaan antara persediaan yang tercatat dan yang sebenarnya tersedia. Penerapan sistem ini dapat membantu operator dalam mencatat setiap transaksi masuk dan keluar secara lebih akurat. Kedua, mengintegrasikan sistem pencatatan persediaan dengan teknologi berbasis digital, seperti sistem yang dapat terhubung langsung dengan Automatic Tank Gauge (ATG) dan sistem PT Pertamina. Hal ini akan membantu dalam mengurangi risiko human error serta meningkatkan transparansi dalam pencatatan stok BBM. Ketiga, meningkatkan pengawasan internal dalam pencatatan stok dan transaksi keuangan dengan menerapkan audit internal secara berkala. Peningkatan pengawasan akan mengurangi potensi fraud yang dapat terjadi akibat lemahnya kontrol terhadap pencatatan persediaan. Keempat, mengakui kehilangan stok akibat penguapan sebagai beban penyusutan dalam laporan keuangan, sesuai dengan PSAK 14 yang mengatur bahwa persediaan yang hilang karena faktor eksternal harus diakui sebagai biaya operasional. Dengan demikian, laporan keuangan SPBU X dapat lebih mencerminkan kondisi sebenarnya. Kelima, meningkatkan pelatihan bagi operator dan petugas lapangan dalam pencatatan persediaan dan pengelolaan laporan keuangan. Pelatihan ini bertujuan

untuk meningkatkan pemahaman terhadap standar pencatatan persediaan yang sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih ketat dalam sistem pencatatan persediaan BBM di SPBU guna meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan. Oleh karena itu, beberapa kebijakan dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan persediaan di SPBU, khususnya dalam hal pencatatan, pengawasan, dan regulasi standar akuntansi dalam industri migas. Pertama, PT Pertamina sebagai pemasok tunggal BBM untuk SPBU perlu menetapkan regulasi yang lebih jelas terkait sistem pencatatan persediaan BBM di setiap SPBU. Selama ini, pencatatan stok BBM di SPBU masih bergantung pada sistem internal masing-masing SPBU, sehingga standar pencatatan tidak seragam. PT Pertamina dapat mewajibkan penggunaan sistem digital yang terhubung dengan sistem utama untuk mencatat setiap transaksi pembelian dan penjualan BBM, guna menghindari kesalahan pencatatan manual dan potensi fraud. Kedua, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perlu menetapkan kebijakan yang lebih spesifik terkait pencatatan penguapan BBM sebagai bagian dari standar akuntansi dalam industri migas. Selama ini, belum ada regulasi yang mengatur tentang bagaimana SPBU harus mengakui kehilangan stok akibat penguapan dalam laporan keuangan mereka. Dengan adanya regulasi yang jelas, setiap SPBU dapat mengikuti standar yang seragam dalam mencatat dan melaporkan penguapan BBM, sehingga laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi yang lebih akurat. Ketiga, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) perlu meningkatkan pengawasan terhadap pencatatan stok BBM di SPBU, khususnya dalam aspek kesesuaian antara data stok fisik, laporan keuangan SPBU, dan data yang dimiliki

oleh PT Pertamina. BPH Migas dapat melakukan inspeksi berkala untuk memastikan bahwa setiap SPBU mematuhi standar pencatatan yang telah ditetapkan. Hal ini akan membantu dalam mengurangi potensi ketidaksesuaian laporan stok BBM serta mencegah adanya manipulasi data persediaan. Keempat, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan dapat berkolaborasi untuk memberikan insentif bagi SPBU yang menerapkan sistem pencatatan digital dalam pengelolaan persediaan mereka. Sistem digital yang lebih modern membutuhkan investasi yang besar, sehingga subsidi atau insentif fiskal dapat diberikan kepada SPBU yang melakukan transisi ke sistem otomatisasi pencatatan stok BBM. Kebijakan ini akan mendorong transformasi digital dalam pencatatan persediaan BBM, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam operasional SPBU. Kelima, PT Pertamina dan Kementerian ESDM dapat menetapkan regulasi terkait integrasi sistem pencatatan stok BBM antara SPBU dan sistem pusat PT Pertamina, guna memastikan transparansi dalam transaksi pembelian dan penjualan BBM. Dengan adanya integrasi ini, PT Pertamina dapat memonitor stok BBM secara lebih akurat di setiap SPBU, dan potensi perbedaan dalam pencatatan stok akibat kesalahan pencatatan manual dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A., & Loebbecke, J. K. (2017). *Auditing and assurance services an integrated approach Sixteenth Edition*. Pearson Education.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of financial management*. Cengage Learning.
- Cantelmi, R., Steen, R., Di Gravio, G., & Patriarca, R. (2022). Resilience in emergency management: Learning from COVID-19 in oil and gas platforms. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 76, 103026. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.103026>
- Clarkson, M. B. E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. *Academy of Management Review*, 20(1), 92–117. <https://doi.org/10.2307/258888>
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. *Academy of Management Review*, 20(1), 65–91. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9503271992>
- Elvionita, C. F., & Hastuti, T. D. (2024). Analysis of gas station financial management to prevent fraud and anticipate the impact of revenue fluctuations. *Ekombis Review*, 12(1), 959–970. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1.5004>
- Firmansyah, A., Novith, D. C., & Andika, W. (2020). Pengungkapan kebijakan persediaan pada perusahaan perdagangan eceran. In *Bunga Rampai: Studi Kasus Akuntansi Keuangan* (pp. 38–75).
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: a stakeholder approach*. Boston : Pitman.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *PSAK 202 Persediaan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jones, T. M. (1995). Instrumental stakeholder theory: A synthesis of ethics and economics. *The Academy of Management Review*, 20(2), 404–437. <https://doi.org/10.2307/258852>
- Jumig, I., & Firmansyah, A. (2018). Kebijakan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan persediaan. *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 5(1), 734–746.

https://www.researchgate.net/publication/326377211_Kebijakan_Pengukuran_Penyajian_Dan_Pengungkapan_Persediaan

- Kartinah, D., & Kuncara, T. (2021). Analysis of the application of recording methods and assessment of inventories in accordance with PSAK No. 14 At Andrew Smith Urban Lifestyle Supermall Karawaci. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(4), 1399–1409.
<https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i4.285>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2024). *Intermediate accounting: IFRS Edition, 5th Edition*. John Wiley & Sons, Inc.
https://www.google.co.id/books/edition/Intermediate_Accounting/VXH5twEACAAJ?hl=en
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting information systems, 13th ed*. Pearson Education Inc.

Halaman Kosong